

Kios 'Mama is My Hero' Diharapkan Bisa Bantu Para Ibu Tulang Punggung Keluarga

JAKARTA (IM) - Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim berharap program usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berupa kios "Mama is My Hero" dapat membantu para ibu yang menjadi tulang punggung keluarga.

Hal ini disampaikan Ali dalam peluncuran kios "Mama is My Hero" bantuan dari Kedutaan Besar (Kedubes) Maroko dan UMKM Corner, di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (19/5).

Acara tersebut dihadiri pula oleh Duta Besar (Dubes) Kerajaan Maroko untuk Indonesia, Ouadia Benabdellah. "Program ini membantu ibu-ibu yang menjadi tulang punggung keluarga. Banyak gara-gara pandemi yang suaminya meninggal dunia atau sakit, kecelakaan, sehingga tidak bisa maksimal sebagai kepala keluarga dari segi ekonomi untuk mencari pendapatan," kata Ali, di Cilincing, Kamis. Ali mengatakan, para ibu dalam kondisi seperti itu harus bangkit agar dapat menghidupi keluarga dan diberi perhatian oleh pemerintah, salah satunya melalui program bantuan UMKM. "UMKM memang usaha

kecil tapi dapat menghidupi keluarga, anaknya bisa hidup normal, sekolah, dan bersosialisasi dengan kebutuhan tercukupi," kata dia.

Ali pun mengapresiasi program bantuan dari Maroko tersebut. Menurut Ali, Pemerintah Kota Jakarta Utara juga memiliki program serupa. "Ini luar biasa ada inisiatif dari pihak yang memang seharusnya kewajiban pemerintah. Ada kekosongan yang dibantu dan belum sempat diisi pemerintah," kata dia.

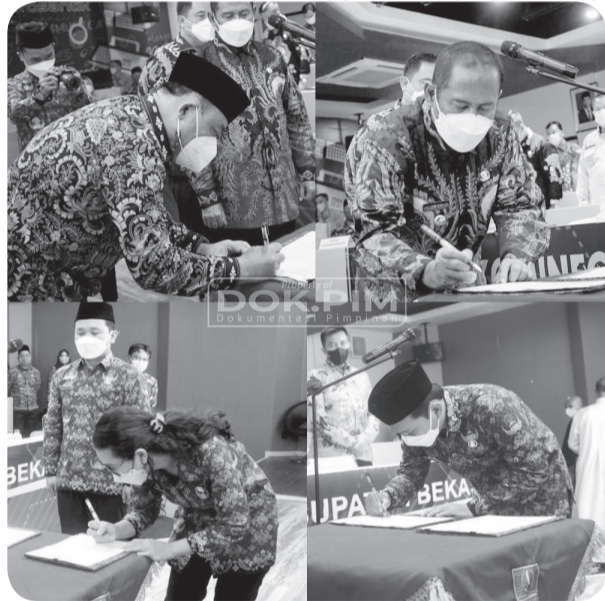
"Saya harap dengan bantuan Dubes dari Maroko ini, akan semakin banyak yang dikerjasamakan," ucap dia.

Adapun satu kios "Mama is My Hero" ditempatkan di halaman belakang Kantor Kecamatan Cilincing. Kios tersebut berhasil didapatkan oleh Ilah, warga Cilincing, melalui proses seleksi. Kios tersebut menjual beragam makanan seperti tongeng, sate kambing dan ayam yang langsung dicicipi oleh Wali Kota serta Dubes Maroko.

Rencananya, kata Ali, kios "Mama is My Hero" akan dikembangkan lagi di beberapa lokasi lain, misalnya di lokasi wisata yang memerlukan dukungan sarana dan prasarana kuliner. ● yan

163 ASN Pejabat Fungsional di Pemkab Bekasi Resmi Dilantik

FOTO: DOK.PIM PROKOPIM SETDAKAB BEKASI



Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi secara hybrid di Command Center, Diskominfoantik, Cikarang Pusat, Kamis (19/5).

CIKARANG PUSAT (IM) - Sebanyak 163 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, telah resmi dilantik oleh Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marzuki. Pelantikan Pengangkatan Pertama Kali dan Pengangkatan Kembali serta Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional tersebut dilaksanakan secara hybrid, bertempat di Ruang Command Center Gedung Diskominfoantik, Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi, Kamis (19/5).

Saat diwawancara, Plt. Bupati berpesan kepada Pejabat Fungsional yang baru saja dilantik untuk terus memberikan inovasi dalam pekerjaannya, dikarenakan Jabatan Fungsional memiliki peran yang sangat strategis bagi percepatan pencapaian program-program Pemkab Bekasi.

"Kepada yang baru saja dilantik, jangan ragu untuk berinovasi sehingga tercapainya kinerja yang baik demi percepatan pencapaian program Pemkab Bekasi," ucapnya dalam rilis Prokoppim Setdakab Bekasi, Kamis (19/5).

Lebih lanjut, ia meminta agar ASN di lingkungan

Pemkab Bekasi untuk selalu meningkatkan kemampuan dan kompetensinya secara berkelanjutan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terus membaik.

"Saya berharap ASN Pemkab Bekasi selalu meningkatkan kemampuannya secara berkesinambungan agar ke depan pelayanan masyarakat bisa terus membaik," ujarnya.

Tak lupa ia juga terus mengingatkan bahwa terdapat nilai-nilai dasar ASN yang harus dipegang teguh, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif (BERAKHLAK), sehingga menghasilkan pekerjaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

"Saya ingin mengingatkan kembali bahwa setiap ASN harus memegang teguh nilai-nilai dasar BERAKHLAK, agar pekerjaan yang kita hasilkan ini bisa membawa manfaat bagi masyarakat," tuturnya.

Pada kegiatan tersebut turut hadir Sekretaris Daerah Dedy Supriyadi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Yana Suyatna, serta Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Bekasi. ● mdl

4 Metropolis

FOTO: ANT



ANTREAN PENUKARAN TIKET ALLO BANK FESTIVAL

Sejumlah warga mengantre untuk menukarkan tiket Allo Bank Festival di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (19/5). Allo Bank Festival yang dilaksanakan pada tanggal 20-22 Mei 2022 tersebut akan menghadirkan berbagai musisi papan atas Indonesia dan Mancanegara itu disambut antusias oleh para penikmat musik.

TINGGAL 5 BULAN MENJABAT GUBERNUR

Komisi D DPRD DKI Soroti PR Anies yang Belum Rampung

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah beliau banyak yang tidak terselesaikan. Pembuatan sumur resapan yang ditargetkan 1,8 juta titik baru terealisasi sebanyak 24.000 titik. Begitu juga dengan pembangunan pengolahan sampah *intermediate treatment facility (ITF)* yang tak kunjung terbangun di sisa masa jabatannya.

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mengatakan,

masih banyak pekerjaan rumah yang belum dikerjakan Gubernur DKI Jakarta, Anies

Baswedan di sisa masa jabatan yang berakhir Oktober 2022.

"RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) beliau ini banyak yang tidak terselesaikan," kata Ida ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (19/5).

Ida memberikan contoh rencana pembuatan sumur resapan yang ditargetkan 1,8 juta titik baru terealisasi sebanyak 24.000 titik. Begitu juga dengan pembangunan pengolahan sampah *intermediate treatment facility (ITF)* yang tak kunjung terbangun di sisa masa jabatannya.

"ITF di empat titik, ternyata

ta sampai hari ini sudah ada peletakan batu pertama tapi berkali-kali (upacara peletakan) batu pertama (digelar) dan tidak ada batu keduanya (kelanjutannya)," ujar Ida. Ida berharap ITF bisa mendapat progres pembangunan positif di sisa masa jabatan Anies meskipun tidak langsung jadi secara keseluruhan. "Minimal sudah ada pembangunan di masa tinggal beberapa bulan lagi," imbuh dia.

Ketua Komisi yang membidangi pembangunan Jakarta ini juga menyoroti janji kampanye pembangunan rumah

DP 0 Rupiah yang saat ini masih belum terealisasi dengan baik. Dari janji 250.000 rumah yang dijanjikan, target diubah menjadi 14.000 dan sudah terealisasi sebanyak 13.000. Pembangunan rumah susun DP 0 Rupiah juga disoroti karena mayoritas berada di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur saja.

"Sedangkan kebutuhan masyarakat enggak hanya di utara dan timur, tapi ada di pusat, barat dan selatan, terutama daerah (Jakarta) Selatan terkait (dampak) normalisasi," kata Ida. ● yan

DKI Antisipasi Efek Wabah PMK Terhadap Sektor Ekonomi

JAKARTA (IM) - Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan (DKPKP) DKI Jakarta mengambil sejumlah langkah strategis sebagai antisipasi efek kemunculan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada berbagai hewan ternak terhadap sektor ekonomi.

"Ini (PMK) dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar akibat menurunnya produksi dan menjadi hambatan dalam perdagangan hewan dan produknya," ucap Kepala Dinas DKPKP DKI Jakarta, Suharni Eliawati.

Eli menyebutkan salah satu langkah pencegahan yang dilakukan Pemprov DKI antara lain rapat berkoordinasi lintas sektoral dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Polda Metro Jaya, OPD terkait, Perumda Dharma Jaya, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia

Cabang DKI Jakarta untuk peningkatan kewaspadaan dini dan mitigasi risiko PMK.

Kemudian, menerbitkan Surat Edaran Kepala Dinas KKP tentang kewaspadaan Penyakit Mulut dan Kuku; lalu melaksanakan sosialisasi atau Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada peternak, stakeholder lainnya bahkan kepada jajarannya Dinas KKP; dan melakukan publikasi informasi PMK melalui media sosial DKPKP serta media.

"Kami juga menyusun SOP pencegahan dan pengendalian PMK; menyusun tim pengawasan dan tim respon cepat; serta melaksanakan pengawasan pemasukan serta pemeriksaan kesehatan hewan di sentra-sentra ternak, dan Rumah Potong Hewan," tutur Eli.

Pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan yang

dilakukan oleh petugas Dinas KKP DKI Jakarta, ucap Eli, dilakukan di lima wilayah kota setiap hari pada tempat penampungan dan pemotongan hewan.

Langkah strategis yang disusun dengan cepat tersebut, kata Eli, mengingat fakta bahwa populasi ternak di DKI Jakarta kurang lebih sebanyak 10.728 ekor yang terdiri dari sapi perah 1.349 ekor, sapi potong 1.723 ekor, kerbau 42 ekor, kambing potong 5.626 ekor, domba 1.620 ekor dan kambing perah 368 ekor.

Kemudian hewan kurban yang masuk ke DKI Jakarta berdasarkan data tahun 2021 sebanyak 64.578 ekor yang terdiri dari sapi 20.449 ekor, kerbau 294 ekor, kambing 37.814 ekor dan domba 6.021 ekor.

"Semuanya itu merupakan hewan yang rentan PMK," ucap Eli. ● yan

Belakang Kantor Wali Kota Jaktim Jadi Lokasi Pembuangan Tinja Ilegal

JAKARTA (IM) - Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta mengungkapkan ada sejumlah tempat yang ditengarai menjadi lokasi pembuangan limbah di tinja di Jakarta, salah satunya di belakang kantor Wali Kota Jakarta Timur.

Hal tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara Dinas LH DKI Jakarta, Yogi Ikhwan, Kamis (19/5). "Di daerah DI Panjaitan, di belakang Kantor Walikota Jaktim ada beberapa tempat yang kita identifikasi," ujar Yogi melalui sambungan telepon.

Sebelumnya diberitakan, sebuah truk kedatangan membuang tinja di Jalan Ahmad Yani, Matraman, Jakarta Timur, pada Selasa (17/5) lalu, sekitar pukul 15.30 WIB. Dinas LH DKI Jakarta pun kemudian memberikan sanksi berupa denda sebesar Rp 500.000 kepada pelaku pembuangan.

Sanksi tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Pengawasan di beberapa titik

rawan pembuangan tinja lalu dilakukan sebagai upaya agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali.

Yogi mengatakan, peristiwa pembuangan limbah tinja bukan kali pertama dilakukan oleh truk tangki penyedot tinja. "Sudah beberapa kali sih kita tangkap," ucap dia.

Ia menguduga, biaya retribusi pembuangan tinja yang diberlakukan membuat para penyedot tinja enggan membuang tinja di lokasi yang disediakan PD Pal Jaya. "Dia (pembuang tinja) enggak mau jauh ke tempat pengelolaan limbah atau daripada (harus) bayar, ya dibuang sembarangan, ada yang nakal-nakal (seperit) itu," kata Yogi.

Untuk itu, Yogi meminta masyarakat untuk menggunakan jasa resmi milik PD Pal Jaya atau jasa sedot WC yang memang bertanggungjawab mengelola limbah dan tidak membuang sembarangan. "Jadi mendingan masyarakat menggunakan itu," imbuh Yogi. ● yan

5 Desa di Muaragembong Jadi Percontohan Program Nasional

FOTO: DOK.PIM PROKOPIM SETDAKAB BEKASI

MUARAGEMBONG (IM) - Lima desa yang ada di Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menjadi desa pertama di Indonesia yang dijadikan proyek percontohan implementasi program pengembangan desa.

"Data Desa Presisi". Pengambilan data desa tersebut dilakukan di Desa Pantai Harapan Jaya, Desa Pantai Mekar, Desa Pantai Sederhana, Desa Pantai Bahagia, dan Desa Jayasakti.

Demikian pemamaparan tim Data Desa Presisi, dalam kegiatan Kick Off Numeric Data Desa Presisi, yang bertempat di Kantor Kecamatan Muaragembong, pada Rabu (18/5), dan dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Wakil Kepala Unit Data Desa Presisi IPB, dan Tim Enumerator Data Desa Presisi.

Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor (LPPM IPB) dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, serta Kementerian Dalam Negeri RI, yang pelaksanaannya telah dilaksanakan di Kecamatan Muaragembong pada bulan April 2022 sampai dengan bu-



Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi (tiga kanan) bersama Tim Data Desa Presisi saat Kegiatan Kick Off Numeric Data Desa Presisi di Kantor Kecamatan Muaragembong, Rabu (18/5).

lan Juli 2022 mendatang.

Sekda Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi menyampaikan, dalam era otonomi daerah kebutuhan terhadap informasi statistik dan data memiliki nilai penting dalam proses percepatan pembangunan, hal ini juga berdampak pada pengembangan Big Data Desa di Kabupaten Bekasi, guna mendapatkan data potensial untuk kepentingan pembangu-

nan daerah maupun nasional. "Kecamatan Muaragembong dipercaya sebagai lokus kegiatan data desa presisi, dan dalam era otonomi daerah sekarang perlu kita miliki informasi statistik yang aktual, dan sangat penting untuk proses percepatan pembangunan daerah maupun nasional kedepannya," ucapnya dalam rilis Prokoppim Setdakab Bekasi, Kamis (19/5).

Dedy menerangkan, Data

Desa Presisi ini menjadi peluang bagi pemerintah desa sebagai salah satu komponen ujung tombak pemerintah daerah yang berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, percepatan pembangunan, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat di masing-masing desa, khususnya persoalan kemiskinan, dan pengangguran.

Ia berharap dengan ket-

ersediaan data pembangunan daerah yang akurat dan presisi ini, ke depannya akan mampu memberikan gambaran bagi pemerintah daerah dan masyarakat terhadap berbagai perubahan di setiap penyelenggaraan pemerintahan, maupun perkembangan pembangunan dari masa ke masa, sehingga arah dan sasaran pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

"Ini tentunya diharapkan mampu memberi gambaran kepada kita semua atas perubahan yang terjadi disetiap progresnya, sehingga arah dan sasaran pembangunan bisa efektif dan efisien," harapnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Unit Data Desa Presisi, Rajib Gandi, mengatakan inovasi Data Desa Presisi ini merupakan inovasi metodologi yang bersifat data numerik, data spasial dan data kualitatif yang digunakan untuk mendata seluruh masyarakat dalam satu kecamatan.

Kemudian, data ini yang nantinya akan menjadi panduan Kementerian Sosial saat menyalurkan kebijakan bantuan sosial agar tepat sasaran. Lebih jauh lagi, data presisi dikatakan juga dapat membantu menghindari polemik data yang selama ini terjadi. ● mdl

PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF ('KIK') DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND

PT Syailendra Capital, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND ("SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND"), dengan ini mengumumkan rencana perubahan KIK dan Prospektus SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND sehubungan dengan perubahan metode penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyerahan dalam Manajer Investasi melakukan penerbitan Kelas Unit Penyerahan baru, yang semula ditetapkan "sebesar Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyerahan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND yang berjalan" menjadi "sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyerahan tersebut diterbitkan".

Rincian rencana perubahan KIK dan Prospektus dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyerahan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND serta pihak-pihak yang berkepentingan.

SYAILENDRA Jakarta, 20 Mei 2022
Manajer Investasi
PT Syailendra Capital
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan